

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ihkhtisar Fikih Jinayat; Hukum Pidana Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 1995, *pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- dan Irdan Dahlan, 1984, *Perbandingan KUHP-HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat bukti dan kekuatan pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Hamrad Hamid dan Harun M. Husen, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktiaan Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Harmien Hadiati Koeswadji, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia; Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Jakarta.
- Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung.
- Leden Marpaung, 2001, *tindak pidana korupsi pemberantasan dan pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Meljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2000, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Klitgaard Robert, 2001, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Klitgaard Robert dalam Lutfi J. Kurniawan dkk, 2006, *Peta korupsi di Daerah, Malang Corruption Watch* dan YAPPIKA, Malang.

Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

----- 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung.

Lutfi J. Kurniawan, *Peta Korupsi di daerah, Malang corruption Watch* dan YAPPIKA, Malang, 2006

Mardjono Reksodiputo, 1989, *pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korporasi*, FH Undip, Semarang.

Muchammad Ihsan dan Endrio Susila, 2006, *Hukum Pidana Islam; Sebuah Alternatif*, LabHukum Fakultas Hukum Uiversitas Muhammadiyah, Yogyakarta.

Revrison Baswir, 2004 *Korupsi di Indonesia Prespektif Struktural*, dalam LP3 UMY, Yogakarta.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sais Sishadi, 1986, *Peranan Saksi dan Saksi Ahli Dalam Penyidikan*, AKPOL, Semarang.

Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Syed Hussein Alatas, 1987, *Sosiologi Korupsi Suatu Penjelasan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta.

Victor M. Situmorang, 1990, *Tindak Pidana PNS*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

----- 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP;*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 24 tahun 1960 tentang Pemberantasan Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Internet

Mochamad Toha, *Ironi Komisi "Pemberantas" Korupsi*, 14 april 2008,
http://www.surya.co.id/web/index.php?option=com_content&task=view&id=27556&Itemid=40

Muhammad Yusuf, *Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi*,
14 April 2008,

<http://www.parliament.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206d0af8&do>

Romli Atmasasmita, *Saksi dalam Perkara Korupsi*,

<http://www.portalhukum.com/index.php?name=News&file=article&sid=26>

Sudirman Said, *Undang-undang Perlindungan Saksi*, 23 Desember 2007,

http://www.transparansi.or.id/berita/berita-april2005/berita_250405.html

Tempo Interaktif, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM*,

<http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-06.id.html>

Koalisi Perlindungan Saksi, *Pengertian Saksi & Perlindungan Bagi "Para Pelapor"*

Haruslah Diperluas, 28 Januari 2008,

http://www.transparansi.or.id/koalisi-ps/catatan_para-pelapor.pdf,

Ustadz Sambo, *Hukum Islam; Proses Jatuhnya Hukuman*, 21 februari 2008,

<http://gerakansholat.wordpress.com/pengajian-mingguan/2005/18-september/>

- - - - *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*; 20 februari 2008,

<http://www.depukumham.go.id/xDepkumhamWeb/xBerita/xUmum/lpsk.htm>

Surat Kabar

Fajar WH, Sutarto, *Presiden Didesak Segera Pilih Anggota LPSK*, Koran Tempo, Jakarta, Rabu 23 Januari 2008

Desy P, Mustafa S, *Vincent Adukan Polda Metro*, Koran Tempo, Jakarta, Rabu 16 Januari 2008

Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peradilan HAM Kompas 17 Juni